

Dana Transportasi Dewan Sisakan Masalah ✓

Mangupura (Bali Post) -

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Anggota DPRD di Kabupaten Badung menyisakan masalah baru. Pasalnya, peraturan yang mengganti mobil dinas dewan dengan dana transportasi berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) puluhan tenaga kontrak.

Sekretaris DPRD Badung I Nyoman Predangga mengatakan, 37 anggota dewan telah mengembalikan kendaraan dinas. Dikatakan, mobil dinas (mobdin) dikembalikan kepada Bagian Aset, kecuali Ketua DPRD dan kedua wakilnya masih memanfaatkan kendaraan tersebut. "Semua (anggota dewan - red) sudah mengembalikan mobil sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2017. Terkait tenaga sopir sedang kami ajukan ke timur (eksekutif - red)," kata Predangga, Selasa (3/10) kemarin.

Predangga berharap seluruh tenaga sopir tetap diberdayakan, sehingga tidak menimbulkan pengangguran. Terlebih, mereka telah bekerja selama bertahun-tahun dalam melayani para legislator. "Kalau bisa, mereka (sopir - red)

masih dipakai. Kasihan sudah lama juga kita ajak," katanya penuh harap.

Mengenai besaran dana transportasi yang akan diterima para anggota dewan, Predangga mengaku masih menunggu peraturan bupati (perbup). Berdasarkan informasi yang beredar, para anggota akan menerima uang tunjangan transportasi sebesar Rp 32 juta per orang.

Lantas, apakah Peraturan Gubernur (Pergub) terkait PP Nomor 18 Tahun 2017 sebagai rujukan pembuatan perbup telah rampung? Menjawab pertanyaan itu, Predangga mengaku belum. "Sekarang belum dapat tunjangan. Kami masih menunggu pergub sebagai acuan. Kalau pergub sudah turun, segera akan dibuatkan perbup (peraturan

bupati - red)," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Badung Putu Parwata membenarkan jika sejumlah anggotanya telah mengembalikan mobil dinas. Dikatakan, pengembalian mobil dinas itu merujuk PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Anggota DPRD.

Sementara itu, anggota DPRD Badung Nyoman Satria mengaku paling pertama mengembalikan mobil dinas. "Ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, harus mengikuti aturan itu. Meskipun Pergub tentang penjabaran PP Nomor 18 Tahun 2017 belum turun, kami sebagai anggota dewan sudah mempersiapkan diri," tegasnya. (kmb27)



Bali Post/eka

MOBIL DINAS - Puluhan mobil dinas yang sebelumnya digunakan para wakil rakyat diparkir di areal parkir Gedung DPRD Kabupaten Badung, Selasa (3/10) kemarin.

Edisi : Rabu, 4 Oktober 2017

Hal : 3



Satu Tersangka Kasus Tukad Mati Ditahan

Denpasar (Bali Post) -

Satu dari tiga tersangka kasus dugaan penyimpangan proyek Tukad Mati di Badung akhirnya ditahan. Dia adalah WS (I Wayan Seraman). Dalam kasus ini, tersangka berperan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dia ditahan Senin (2/10) petang usai menjalani pemeriksaan di Kejari Denpasar.

Informasi Selasa (3/10) kemarin menyebutkan, tersangka melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Namun pihak kejaksaan belum merespons pengajuan tersebut. Yang menarik, pascadilakukan penahanan, WS kini menyeret atasannya yang konon tokoh sentral dalam pembangunan send-

eran Tukad Mati. Bahkan orang tersebut sudah pernah diperiksa sebagai saksi di kejaksaan. Dalam kasus ini, penyidik kejaksaan menetapkan tiga orang tersangka. Dua lainnya adalah St selaku rekanan dan GD salah satu pejabat Badung atau PPK yang diduga ikut terlibat dalam kasus tersebut. Namun keduanya belum ditahan. In-

formasi yang diterima, penahanan pasti dilakukan, namun menyusul sambil menunggu berkas tersangka rampung.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Denpasar Tri Syahru Wira Kosadha didampingi Kasi Intel IGNA Kusumayasa Diputra menyatakan, sesuai acara pidana pasal 54 dinyatakan bahwa ada dua alasan

penahanan yakni objektif dan subjektif. Di mana, menurut Syahru Kosadha, dikhawatirkan tersangka melarikan diri, menghilangkan alat bukti serta mengulangi perbuatannya.

Terkait belum adanya kerugian menurut hitungan dari BPKP, Syahru Kosadha mengatakan bahwa dari hitungan ahli, sudah ditemukan adanya kerugian negara. Selain itu, penetapan tersangka yang sudah cukup lama.

"Penahanan ini dilakukan untuk mempercepat proses pemberkasan sambil menunggu

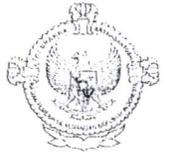
hasil penghitungan dari BPKP," tandas Syahru Kosadha.

Menurut Kasi Pidsus, pihaknya sudah beberapa kali mendatangi BPKP terkait perhitungan kerugian negara proyek pembangunannya sendiran Tukad Mati.

Ditanya kerugian negara menurut hitung-hitungan ahli teknis, Syahru Kosadha mengatakan sekitar Rp 700 juta. "Kerugian sekitar Rp 700 juta dari proyek senilai Rp 2,2 miliar. Tetapi tidak tertutup kemungkinan, kerugiannya akan lebih dari itu," jelasnya. (kmb37)

Edisi : Rabu, 4 Oktober 2017

Hal : 7



IHPS I 2017 Diserahkan

Seluruh Daerah di Bali Dapat WTP

Jakarta (Bali Post) -

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10) kemarin. Dari IHPS I 2017 tersebut diketahui seluruh daerah di Bali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam rapat tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyebutkan, menemukan 14.997 permasalahan yang berpotensi merugikan negara Rp 27,39 triliun. Sejumlah permasalahan tersebut meliputi kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 25,14 triliun. Dari jumlah itu, per-

masalah karena ketidakpatuhan telah mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 1,81 triliun, sedangkan potensi kerugiannya mencapai Rp 4,89 triliun, serta kekurangan penerimaan senilai Rp 18,44 triliun. "Pada saat pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyeteror ke kas negara/daerah Rp 509,61 miliar," terang Moermahadi.

Menurut Moermahadi, untuk permasalahan karena ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp 2,25 triliun.

IHPS I Tahun 2017 ini, dijelaskan, merupakan ringkasan dari 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 645 LHP keuangan, 9 LHP kinerja, dan 33 LHP dengan tujuan tertentu. Terkait dengan Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016, telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sebanyak 74 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) memperoleh opini WTP (84%), capaian ini mulai mendekati target Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2019 sebesar 95%. 8 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (9%), dan 6 LKKL memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (7%). Indeks opini atas capaian tingkat perolehan opini WTP pada pemeriksaan tahun 2017 adalah 3,70, masih di bawah target bidang Reformasi Keuangan Negara yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 3,88.

Hal. 19 Penguatan Pemerintah

Penguatan Pemerintah

Dari Hal. 1

Berbeda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), capaian opini pada LKPD telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.

"Pemerintah provinsi dengan opini WTP sejumlah 91% dari target 85%, pemerintah kabupaten sejumlah 66% dari target 60%, dan pemerintah kota sejumlah 77% dari target 65%," kata Moermahadi.

Hasil pemeriksaan kinerja yang signifikan antara lain pemeriksaan atas kegiatan niaga dan transportasi gas, pemasaran luar negeri dan pemeliharaan pesawat, dan pengelolaan KPR Sejahtera dan subsidi selisih angsuran/subsidi selisih bunga.

Sementara hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang perlu diperha-

tikan adalah perhitungan bagi hasil migas. BPK masih menemukan biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam cost recovery untuk bagi hasil migas tahun 2015 sebesar US\$956,04 juta atau ekuivalen Rp 12,73 triliun.

BPK telah memantau 463.715 rekomendasi hasil pemeriksaan senilai Rp 285,23 triliun. Dari jumlah itu, yang telah sesuai dengan rekomendasi adalah 320.136 rekomendasi (69,0%) senilai Rp 132,16 triliun.

Moermahadi menambahkan, efektivitas hasil pemeriksaan BPK akan tercapai jika laporan hasil pemeriksaannya ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. "BPK berharap IHPS I Tahun 2017 dapat menjadi acuan perbaikan pengelolaan keuangan negara pada semester berikutnya untuk memperkuat upaya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sehingga mencapai tujuan negara," katanya. (kmb4)



Moermahadi Soerja Djanegara

Edisi : Rabu, 4 Oktober 2017

Hal : 1 & 19